



Pengungkapan Pengendalian Internal: Esensi Komisaris Independen dan Struktur Kepemilikan Industri Perbankan di Indonesia

Agus Ismaya Hasanudin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ismayaagus@gmail.com

Dadan Ramdhani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ddn_ramdhani@yahoo.com

Andry Dwi Fajar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
fajardwi@yahoo.com

Diterima 19 April 2020, diterbitkan 30 April 2020

Abstract

This study aims to examine the influence of independent commissioners on the disclosure of internal controls with ownership structure as a moderating variable. This study uses the sampel of the banking industry sector in Indonesia during 2013-2018. The sampling method used in this study is purposive sampling, the number of companies that made sampel this company is 119 companies with observations for 3 years. Data processing used by researchers is multiple regression analysis. The results of this study show that independent commissioners negatively affect the disclosure of internal controls, while the government ownership structure strengthens the influence of independent commissioners on disclosure of internal controls and private ownership structure weakens the influence of independent commissioners on the disclosure of internal controls.

Keywords: Disclosure of Internal Control, Independent Commissioner, Ownership Structure

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan pengendalian internal dengan struktur kepemilikan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan sampel sektor industri perbankan di Indonesia selama 2013-2018. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, jumlah perusahaan yang membuat sampel perusahaan ini adalah 119 perusahaan dengan pengamatan selama 3 tahun. Pemrosesan data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan kontrol internal, sedangkan struktur kepemilikan pemerintah memperkuat pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan kontrol internal dan struktur kepemilikan pribadi melemahkan pengaruh komisaris independen atas pengungkapan pengendalian internal.

Kata kunci: Pengungkapan Pengendalian Internal, Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan

PENDAHULUAN

Pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan merupakan pengungkapan yang bersifat wajib yang bertujuan untuk merefleksikan efektivitas penerapan pengendalian internal yang dilakukan oleh sekumpulan mekanisme *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Leng dan Ding, 2011). Menurut Asbaugh-skaife, Collins, dan Kinney (2007) pengungkapan pengendalian internal dapat meningkatkan nilai perusahaan karena dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan yang dapat merugikan investor dan *stakeholder* lainnya.

Di Indonesia penerapan dan pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan diatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 5/22/DPNP tahun 2003 perihal pedoman standar sistem pengendalian internal bagi bank umum, sehingga perusahaan perbankan wajib menerapkan pengendalian internal dalam kegiatan operasinya dan mengungkapkan pengendalian internal secara menyeluruh (Surat Edaran Bank Indonesia, 2003). Ketentuan pengungkapan pengendalian internal pun diperkuat oleh adanya Peraturan Bank Indonesia nomor 14/14/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/35/DPNP tahun 2012 tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. Pengendalian internal perlu mendapat perhatian Bank, mengingat salah satu faktor penyebab terjadinya kegagalan usaha Bank adalah tidak efektifnya pengendalian internal.

Pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan merupakan salah satu pengungkapan yang penting dilakukan karena dapat merefleksikan efektivitas pengendalian internal perusahaan. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman, (lampiran Surat Edaran Bank Indonesia nomor 5/22/DPNP tahun 2003). Selanjutnya Menurut Asbaugh-skaife, Collins, dan Kinney (2007) pengungkapan pengendalian internal dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan yang dapat merugikan investor dan *stakeholder* lainnya. Industri keuangan nasional khususnya perbankan, saat ini masih dibayangi oleh aksi kejahatan yang memanipulasi informasi dengan tujuan merengguk keuntungan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Kondisi ini sangat merugikan pihak manajemen perbankan. Menurut data Bank Indonesia selama periode Januari hingga Oktober 2011 terjadi banyak kasus pembobolan dana nasabah dengan nilai Rp 30,61 miliar melalui kartu.

Strategik Indonesia menyatakan bahwa modus kejahatan perbankan bukan hanya penipuan (*fraud*), tetapi lemahnya pengawasan *internal control* bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik lemah kejahatan perbankan. Strategik Indonesia juga mencatat, dalam kuartal 2011 telah terjadi sembilan kasus pembobolan bank di berbagai industri perbankan, diantaranya pembobolan kantor kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Tamini Square yang melibatkan supervisor kantor kas tersebut dengan nilai kerugian sebesar 6 juta dolar Amerika. Pencairan deposito dan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri yang melibatkan lima tersangka, salah satunya adalah *costumer service* bank tersebut dengan nilai kerugian mencapai Rp 18 miliar. Industri perbankan adalah industri yang berbasis kepercayaan. Guna meningkatkan kepercayaan *investor* dan *stakeholders* bank harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya, di antaranya melalui penerapan *corporate governance* dan pengendalian internal. *Corporate governance* dan pengendalian internal memiliki kaitan yang erat dan menjadi isu bisnis yang penting pada saat ini. *Corporate Governance* dalam penelitian ini diprosikan pada Komisar Independen. Komisar Independen adalah anggota Dewan Komisar yang tidak terafiliasi dengan pengelola perusahaan maupun pemilik saham dalam bentuk hubungan bisnis maupun kekeluargaan. Komisar Independen dipilih karena memiliki

tugas mengawasi dan mengontrol perusahaan secara langsung sehingga dapat meminimalisir *agency cost* yang mungkin terjadi akibat perbedaan kepentingan. Hal lain yang melandasi pemilihan Komisaris Independen sebagai fokus penelitian adalah pendapat Jensen dan Meckling (1976) yang mengungkapkan bahwa semakin banyak Komisaris Independen maka kemungkinan terjadi konflik semakin rendah sehingga akan menimbulkan tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan. Keberadaan Komisaris Independen telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Corporate Governance*. Dan Kep-305/BEJ/07-2004 agar perusahaan yang *listed* di bursa efek mempunyai Komisaris Independen minimal 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Jumlah dewan komisaris yang besar dapat memunculkan perpaduan keahlian sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan pengendalian internal yang di sampaikan (Suhardjanto dan Dewi, 2011). Penelitian Suhardjanto (2011), dan ratu (2018) mendapatkan adanya pengaruh positif jumlah dewan komisaris terhadap pengungkapan pengendalian internal. Sementara itu, hasil penelitian Mensah (2016) tidak konsisten dengan penelitian Abeysekera (2010), Suhardjanto, dkk (2011), dan ratu (2018) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal. Selain ukuran dewan komisaris, Leng dan Ding (2011) menyatakan bahwa komisaris independen dapat mengawasi dan mengacu kinerja direktur eksekutif dan manajemen.

Pengujian struktur kepemilikan (*ownership structure*) sebagai variabel moderasi di dasarkan pada struktur kepemilikan merupakan komposisi modal antara hutang dan ekuitas termasuk juga proporsi antara kepemilikan saham *inside shareholders* dan *outside shareholders* (Amran et al., 2009). Struktur kepemilikan yang berbeda akan memberikan pengawasan yang berbeda terhadap pengungkapan (Guojin Gong, 2013). Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Semakin banyak pihak yang butuh informasi tentang perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut menyebabkan struktur kepemilikan menjadi faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan, (Intan dan Salma, 2018).

Heather (2000) menyatakan bahwa laporan manajemen terkait dengan pengendalian internal sangat berguna untuk meningkatkan pengendalian terhadap perusahaan serta dapat menyediakan informasi yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan. Guojin Gong, (2013) menemukan hubungan yang positif antara struktur kepemilikan terhadap pengungkapan pengendalian internal, hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan yang baik Akan berdampak pada kualitas pengungkapan pengendalian internal. Struktur kepemilikan dalam penelitian ini diprosikan pada bank milik pemerintah (BUMN) dan bank milik swasta. Kepemilikan pemerintah dipilih karena pendapatan bank BUMN mengungguli beberapa bank swasta pada tahun 2014 (Kompas, 2016). Sedangkan kepemilikan bank swasta dipilih karena jumlah bank swasta di Indonesia sangat dominan yaitu jumlah bank swasta nasional devisa berjumlah 44 bank (OJK, 2018) dan jumlah bank swasta nasional non devisa berjumlah 30 (Bank Indonesia, 2018) jika dibandingkan dengan jumlah bank kepemilikan lainnya.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Telaah Teori

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa suatu hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk menjalankan usaha atas nama mereka (*principal*) dan melibatkan pendelegasian sebagian

kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada *agent*. Jika kedua pihak memiliki hubungan memaksimalkan kegunaan (*utility maximizers*) merupakan alasan baik untuk percaya bahwa *agent* tidak akan selalu bertindak dalam kepentingan terbaik *principal*.

Pemilihan teori keagenan karena, *information gap* (kesenjangan informasi) terjadi pada berbagai perusahaan dikarenakan pihak manajer setiap hari berinteraksi langsung dengan kegiatan perusahaan, sehingga pihak manajer sangat mengetahui kondisi perusahaan dan mereka mempunyai informasi yang sangat lengkap mengenai perusahaan yang dikelolanya, sedangkan informasi tersebut dimiliki oleh pemilik perusahaan hal ini dapat menimbulkan asimetri informasi.

H₁: Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal

Pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan merupakan pengungkapan yang bersifat wajib yang bertujuan untuk merefleksikan efektivitas penerapan pengendalian internal yang dilakukan oleh sekumpulan mekanisme *corporate governance* dalam suatu perusahaan, Leng dan Ding (2011). Salah satu mekanisme *corporate governance* yaitu Komisaris Independen memiliki pengawasan yang lebih baik terhadap manajer sehingga mampu mempengaruhi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan manajer. Hal ini sesuai dengan pendapat Jensen dan Meckling (1976) yang menyebutkan bahwa teori agensi mendukung pernyataan bahwa untuk meningkatkan independensi Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris harus didominasi oleh pihak yang berasal dari luar perusahaan (*outsider*). Penelitian Leng dan Ding (2011) mendapatkan hasil adanya hubungan positif antara pengungkapan pengendalian internal dengan remunerasi Dewan Komisaris, rangkap jabatan ketua dan manajer umum, tingkat pendidikan Komisaris dengan pengungkapan pengendalian internal.

Penelitian Suhardjanto dan Permatasari (2010) menyatakan bahwa keberadaan anggota Dewan Komisaris Independen meningkatkan kualitas kontrol perusahaan. Sehingga pelaksanaan fungsi komisaris independen mempengaruhi pelaksanaan akan berdampak positif dalam kepatuhan pengungkapan pengungkapan pengendalian internal. Zhou dan Chen (2010) menguji pengaruh *corporate governance* dengan pengungkapan pengendalian internal di China, menemukan bahwa pengungkapan pengendalian internal berpengaruh positif dengan ukuran dewan komisaris, komposisi Dewan Komisaris Independen, dan pengungkapan pengendalian internal.

H₂ : Pengaruh Struktur Kepemilikan Pemerintah Terhadap Komisaris Independen dan Pengungkapan Pengendalian Internal

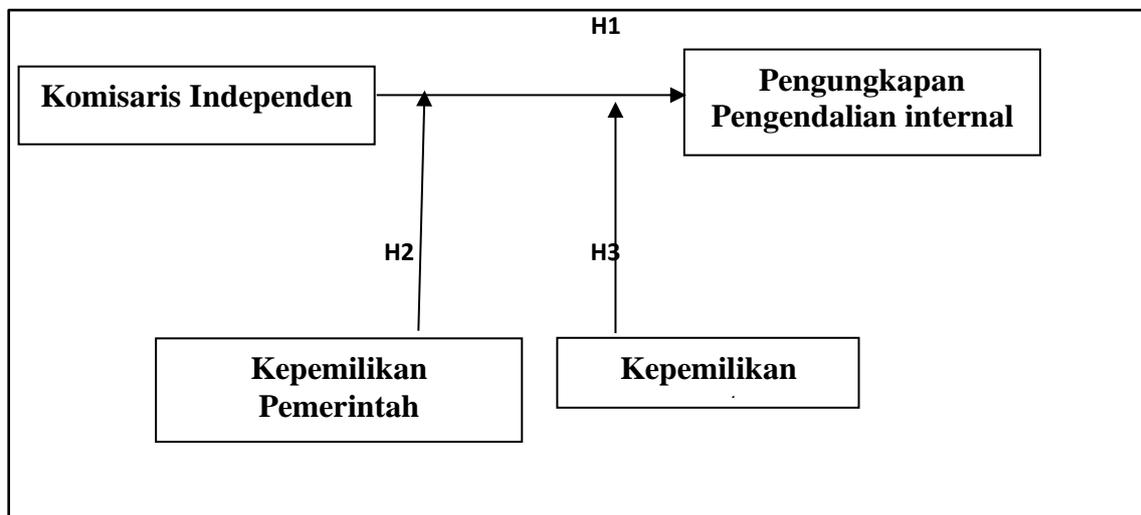
Pengungkapan Pengendalian Internal dalam laporan tahunan mencukupi kebutuhan informasi *stakeholders* dan sesuai dengan peraturan yang ada, maka diperlukannya *corporate governance*. Linda (2012) menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* diperlukan untuk mengurangi ketidakefisienan yang timbul dari permasalahan keagenan. Keefektifan mekanisme *corporate governance* salah satunya ditentukan oleh komposisi Dewan Komisaris. Peran Dewan Komisaris yang digunakan yaitu Komisaris Independen. Komisaris Independen adalah salah satu mekanisme eksternal yang memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan (Abeysekera, 2008).

Kepemilikan saham oleh pemerintah menyebabkan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus selaras dengan kepentingan pemerintah. Pemerintah berhak menunjuk direktur perusahaan sehingga keputusan bisnis yang diambil merupakan kepentingan pemerintah (Lassoued, 2018). Selain itu, imbalan yang diberikan kepada manajer bank sebagian

besar tergantung seberapa baik manajer melaksanakan instruksi dari pusat atau pemerintah (Chen *et al.*, 2009).

H₃ : Pengaruh Kepemilikan Swasta Terhadap Komisaris Independen Dan Pengungkapan Pengendalian Internal

Mekanisme *corporate governance* diperlukan untuk mengurangi ketidakefisienan yang timbul dari permasalahan keagenan. Keefektifan mekanisme *corporate governance* salah satunya ditentukan oleh komposisi dewan komisaris. Peran Dewan Komisaris yang digunakan yaitu Komisaris Independen. Komisaris Independen adalah salah satu mekanisme eksternal yang memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan (Abeysekera, 2008). Proporsi Dewan Komisaris Independen dikatakan sebagai independensi Dewan karena kehadiran Komisaris Independen meningkatkan kualitas pengawasan dan bebas dalam pengambilan keputusan (Meyzaroh dan Lucyanda, 2011).



Sumber: Diolah untuk penelitian ini (2019)

Gambar 1. Model Kerangka Konsep Penelitian Komisaris Independen, Pengungkapan Pengendalian internal dan Struktur Kepemilikan

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Menurut Sekaran (2006) populasi adalah jumlah dari keseluruhan kelompok individu, kejadian-kejadian yang menarik perhatian peneliti untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh industri perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2013-2018 sejumlah perusahaan. Jumlah tersebut terbagi-bagi menjadi beberapa katagori sesuai dengan jenis kepemilikannya dan ruang lingkup operasinya. Perusahaan perbankan dipilih karena perusahaan perbankan diwajibkan untuk mengungkapkan pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan yang di atur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 5/22/DPNP tahun 2003.

Pengambilan sempel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan criteria yang ditentukan. Adapaun kriteria-kriteria tersebut adalah:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) selama periode 2013 – 2018, dan tidak mengalami delisting

2. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data keuangan, Komisaris Independen, pengungkapan pengendalian internal, dan struktur kepemilikan pemerintah dan struktur kepemilikan swasta.
3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan dan laporan tahunannya.

Variabel Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari pengaruh bisnis atau pengaruh lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006).

Komposisi Komisaris Independen di ukur dengan perbandingan jumlah Komisaris Independen dengan jumlah total Dewan Komisaris (Abeysekera, Suhardjanto dan Pemata Sari, 2010).

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Sumber : Diolah untuk penelitian ini (2019)

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan pengendalian internal. Pengungkapan pengendalian internal merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan untuk merefleksikan efektivitas pengendalian internal dalam suatu organisasi (Leng dan Ding, 2011). Pengukuran pengungkapan pengendalian internal di ukur menggunakan *dummy*, yaitu dengan memberikan nilai 1 untuk setiap item yang di ungkapkan dan nilai 0 untuk item yang tidak di ungkapkan, kemudian membagi total item yang di ungkapkan dengan nilai maksimum dari seluruh item yang berjumlah 25 (Ratu, 2018). Item pengungkapan yang di susun mengacu pada lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang pedoman standar system pengendalian internal bagi bank umum.

$$\text{DISC} = \frac{\sum \text{ICD}}{\sum \text{MICD}}$$

Sumber : Diolah untuk penelitian ini (2019)

Keterangan :

DISC : Pengungkapan pengendalian internal

ICD : Pengungkapan pengendalian internal (skor untuk setiap item informasi pengendalian internal yang di ungkapkan dalam laporan tahunan)

MICD : Maksimum pengungkapan pengendalian internal (total skor maksimum atas item pengendalian internal yang diungkapkan, 25)

Variabel Moderasi

Struktur kepemilikan dalam penelitian ini diproksikan pada bank milik pemerintah (BUMN) dan bank milik swasta. Kepemilikan pemerintah dipilih karena pendapatan bank BUMN mengungguli beberapa bank swasta pada tahun 2014 (Kompas, 2016). Sedangkan kepemilikan bank swasta dipilih karena jumlah bank swasta di Indonesia sangat dominan yaitu jumlah bank swasta nasional devisa berjumlah 44 bank (OJK, 2018) dan jumlah bank swasta nasional non devisa berjumlah 30 (Bank Indonesia, 2018) jika dibandingkan dengan jumlah bank kepemilikan lainnya.

Kepemilikan Pemerintah

Pemerintah sebagai pemilik atau pemegang saham mayoritas pada bank milik negara memiliki hak untuk mengendalikan dan mengontrol kegiatan bank sesuai tujuan yang ingin dicapainya berpotensi menimbulkan konflik dengan manajemen bank. Menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013) kepemilikan pemerintah adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak pemerintah (*government*) dari seluruh modal saham yang dikelola. Menurut Cornett (2009) birokrat politik mempunyai tujuan yang seringkali berbaur kepentingan politik tetapi bertentangan dengan perbankan kesejahteraan social dan maksimalisasi nilai perusahaan.

Dalam penelitian ini, pengukuran kepemilikan pemerintah menggunakan *variable dummy*. Diberi nilai 1 jika perusahaan merupakan perusahaan pemerintah dan diberi nilai 0 jika sebaliknya.

Kepemilikan Swasta

Kepemilikan swasta adalah kepemilikan saham yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh investor swasta (Aymen, 2013). Menurut collins dictionary, "*private ownership definitions is the fact of being owned by a private individual or organization, rather than by the state or a public body*". Dengan kata lain kepemilikan swasta adalah fakta yang dimiliki oleh individu swasta atau organisasi, bukan oleh negara atau badan publik. Jadi kepemilikan swasta adalah kepemilikan yang dimiliki oleh pihak swasta, baik itu individu, keluarga maupun organisasi atau intitusi bukan oleh publik atau negara. Dalam penelitian ini, pengukuran kepemilikan swasta menggunakan *variable dummy*. Diberi nilai 1 jika perusahaan merupakan perusahaan swasta dan diberi nilai 0 jika sebaliknya.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini untuk menguji regresi dengan variabel moderating yaitu dengan uji interaksi. Lie Liana (2009) menyatakan bahwa uji interaksi atau sering disebut dengan *Moderated Regresion Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Pengelolaan data dalam penelitian ini mengandung SPSS 20. uji asumsi klasik terdiri dari: (1) uji normalitas; (2) uji multikolinearitas; (3) uji heteroskedastisitas; dan (4) uji autokolerasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 diatas menggambarkan deskripsi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Minimum adalah nilai terkecil dari suatu rangkaian pengamatan, maksimum adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan, *mean* (rata-rata) adalah hasil penjumlahan nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data, sementara strandar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data.

Tabel 1 Statistik Diskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IDC	351	,72	,84	,7398	,02599
KI	351	,00	1,00	,5775	,19293
SMS	351	,00	1,00	,5897	,49258
SMP	351	,00	1,00	,413	,49258
Valid N (listwise)	351				

Sumber : data diolah untuk penelitian ini (2019)

Statistik Diskriptif pada Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata variabel dependen yaitu Pengungkapan Pengendalian Internal dari 117 perusahaan yang dijadikan sampel memiliki nilai rata-rata sebesar 73,98%, rerata perusahaan perbankan sudah melakukan pengungkapan pengendalian internal namun belum mengungkapkan semua item pengungkapan pengendalian internal. Nilai minimum sebesar 72%, perusahaan perbankan minimum melakukan pengungkapan pengendalian internal bahwa perusahaan perbankan sudah melakukan pengungkapan pengendalian internal namun belum semua mematuhi pengungkapan pengendalian internal. Nilai maksimum sebesar 84%, perusahaan perbankan maksimal pengungkapan pengendalian internal hal ini sudah memenuhi perusahaan perbankan sudah melakukan pengungkapan pengendalian internal namun belum sepenuhnya memenuhi aturan yang seharusnya 100%. Perusahaan yang memiliki nilai IDC terbesar adalah Bank Andara, Bank Mega dan Bank Anglomas yaitu sebesar 84%. Perusahaan yang memiliki nilai IDC terendah adalah Bank UOB, Bank Pan, Bank QNB, Bank Andara, Bank national nobu, Bank Sulawesi tenggara Bank Papua, Bank Sinar harapan bali, Bank Centratama. Semakin besar nilai Pengungkapan pengendalian internal maka semakin lengkap informasi yang diungkapkan perusahaan sebagai bahan informasi bagi *stakeholders* dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

Statistik Diskriptif pada Tabel 1 membuktikan bahwa rata-rata variabel Independen yaitu Komisaris Independen dari 117 perusahaan yang dijadikan sampel memiliki nilai rata-rata sebesar 57,75% namun kepemilikan komisaris independen pada perusahaan perbankan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, nilai minimum sebesar 0,00% terdapat di perusahaan bank of Amerika hal ini dikarenakan bank of Amerika hanya memiliki komisaris independen pada bank di pusatnya yaitu Amerika, nilai maksimum sebesar 100% terdapat di perusahaan bank ICB Bumiputra yang sudah mematuhi aturan Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan setiap bank memiliki komisaris independen minimal 50%. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata di industri perbankan hanya memiliki komisaris independen sebesar 57,75 % hal tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan telah memenuhi peraturan BAPEPAM yang menganjurkan setiap perusahaan memiliki komisaris independen sebesar 50%. Bank yang memiliki nilai KI terbesar adalah Bank ICB Bumiputera, Bank Victoria Syariah dan Bank Riau. Perbankan yang memiliki nilai KI terendah adalah Bank Bangkok dan Bank of america. Semakin besar jumlah Komisaris Independen yang dimiliki perusahaan diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan kegiatan bank termasuk dalam mengungkapkan pengendalian internal perusahaan.

Statistik Diskriptif pada Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata variabel Struktur Kepemilikan Swasta dari 117 bank yang dijadikan sampel memiliki nilai rata-rata sebesar

58,97%, nilai minimum sebesar 0,00%, dimiliki oleh bank BNI, nilai maksimum sebesar 1,00% dimiliki bank Yudha bakti. Perusahaan yang memiliki nilai Struktur Kepemilikan Swasta maksimum adalah bank BTPN, bank Yudha Bakti, Nilai struktur kepemilikan swasta yang memiliki nilai minimum adalah bank Internasional, bank JB syariah. Semakin besar nilai struktur kepemilikan swasta yang dimiliki perusahaan diharapkan dapat menyediakan informasi yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan.

Statistik Diskriptif pada Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata variabel Struktur Kepemilikan Pemerintah dari 117 bank yang dijadikan sampel memiliki nilai rata-rata sebesar 41,30%, nilai minimum sebesar 0,00% dimiliki bank BTPN nilai maksimum sebesar 1,00% dimiliki bank BRI. Perusahaan yang memiliki nilai Struktur Kepemilikan Pemerintah maksimum adalah bank Sahabat Sampurna, bank Sinar Harapan Bali, Nilai struktur kepemilikan Pemerintah yang memiliki nilai minimum adalah bank Pundi, bank Royal. Semakin besar nilai struktur kepemilikan pemerintah yang dimiliki perusahaan diharapkan dapat menyediakan informasi yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan analisis *One Sample Kolmogorov Smirnov*, normalitas data penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	4,075
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	

Sumber: data diolah untuk penelitian ini (2019)

Berdasarkan hasil uji normalitas penelitian ini dapat di lihat dari Tabel 2 diatas. Dengan menggunakan uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov test* menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak berdistribusi normal dan tidak memenuhi asumsi normalitas karena tingkat signifikasi kurang dari $\alpha = 0,05$. Dalam penanggulangannya peneliti telah berusaha dengan berbagai macam transformasi normalitas antara lain Lag, Sqrt, Lg, dan Ln, akan tetapi tidak dapat membantu untuk menaikkan nilainya menjadi lebih baik, sehingga hal ini menjadi keterbatasan dalam uji normalitas.

Uji Multikolinieritas

Gejala multikolinieritas dalam suatu model penelitian dapat dideteksi dari nilai VIF dan nilai *tolerance* pada masing-masing variabel. Hasil pengujian multikolinieritas pada model disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3 Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
(Constant)	-	-	
KI	1,000	1,000	Tidak terjadi multikolinieritas
SMP	,840	1,190	Tidak terjadi multikolinieritas
SMS	,959	1,043	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : data diolah untuk penelitian ini (2019)

Berdasarkan pada Tabel 3 terlihat bahwa terdapat multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil pengujian *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 (10%), yaitu variabel Komisaris Independen (KI) sebesar 1,000, Struktur Kepemilikan Pemerintah (SMP) sebesar 0,840, dan Struktur Kepemilikan Swasta (SMS) sebesar 0,959. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, yaitu variabel Komisaris Independen sebesar (KI) 1,000, Struktur Kepemilikan Pemerintah (SMP) sebesar 1,190, dan Struktur Kepemilikan Swasta (SMS) sebesar 1,043. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel dalam model regresi tersebut.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel kriteria keputusan autokorelasi, diketahui bahwa nilai d , nilai dU : 1,768 dan nilai Durbin Watson (DW) pada model 1 sebesar 1,875. Mengingat nilai DW lebih besar dari nilai Du maka menggunakan perhitungan tambahan untuk menentukan keputusan autokorelasi sebagai berikut :

$$4 - dU ; 4 - 1,768 = 2,232$$

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui apabila nilai DW berada pada kriteria penilaian dU s.d $4 - dU$ atau $1,768 (dU) < 1,875 (DW) < 2,232 (4 - dU)$ maka dapat ditarik kesimpulan yaitu "tidak ada autokorelasi" dalam penelitian ini. Dengan demikian pada model dinyatakan tidak ada autokorelasi.

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi dalam model analisis yang digunakan, maka cara yang digunakan adalah melakukan pengujian serial korelasi dengan uji Durbin Watson. Hasil uji autokorelasi pada model disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4 Uji Autokorelasi

Model	DW	Du	Keterangan
Model 1	1.875	1.768	Tidak terdapat autokorelasi

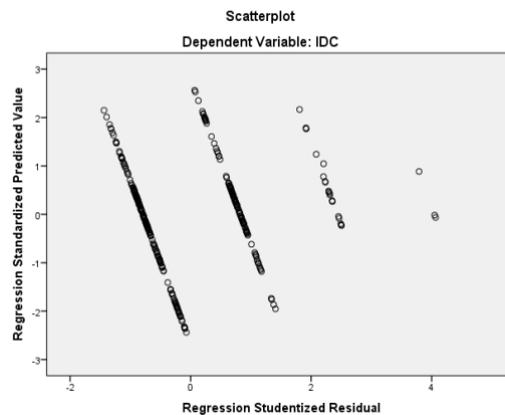
Sumber: data diolah untuk penelitian ini (2019)

Uji Heteroskedastisitas

Gejala heteroskedastisitas timbul akibat terjadinya ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan kepada pengamatan yang lainnya.

Berdasarkan gambar 1, diketahui data penelitian yang ditunjukkan oleh simbol titik dalam grafik (*scaterrplot*) tidak menunjukkan adanya pola tertentu yang teratur melainkan titik

tersebut menyebar secara acak meskipun tidak signifikan diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model terhindar dari gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat menggunakan metode *scaterplot* yang disajikan pada gambar berikut :



Gambar 1 Uji Heterokedasitas

Berdasarkan gambar 1, diketahui data penelitian yang ditunjukkan oleh simbol titik dalam grafik (*scaterrplot*) tidak menunjukkan adanya pola tertentu yang teratur melainkan titik tersebut menyebar secara acak meskipun tidak signifikan diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model terhindar dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Kebaikan Model (*Goodness of Fit*)

Uji *goodness of fit* merupakan pengujian kecocokan atau kebaikan sesuai antara hasil pengamatan tertentu dengan frekuensi yang diperoleh berdasarkan nilai harapannya. Indikator dari *goodness of fit* salah satunya dapat dilihat dari uji F dan koefisien determinasinya.

Uji Signifikansi Simultan

Uji signifikansi simultan atau uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model penelitian berpengaruh secara simultan terhadap variabel tetapnya. Hasil uji signifikansi simultan pada model disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5 Hasil Uji Signifikansi Simultan Moderasi 1

ANOVA ^a	
F _{hitung}	Sig.
5,609	0,000
a. Dependent Variable: IDC	
b. Predictors: (Constant), KI, SMS, MODERASI	

Sumber : data diolah untuk penelitian ini (2019)

Tabel 6 Hasil Uji Signifikansi Simultan Moderasi 2

ANOVA ^a	
F _{hitung}	Sig.
8,084	0,000
a. Dependent Variable: IDC	
b. Predictors: (Constant), KI, SMP, MODERASI	

Sumber : data diolah untuk penelitian ini (2019)

Berdasarkan Tabel 5, diketahui nilai F_{hitung} sebesar 5,609 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Jika nilai signifikansi ($0.000 < \alpha (0,05)$), maka dapat disimpulkan kombinasi variabel bebas yang terdiri dari komisarisis independen (KI) secara bersama-sama mempengaruhi Pengungkapan pengendalian internal (IDC) Hasil ini menunjukkan bahwa model berada dalam kategori baik dan lulus persyaratan uji *goodness of fit* (Ghozali, 2011).

Berdasarkan Tabel 6 diketahui nilai F_{hitung} sebesar 8,084 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Jika nilai signifikansi ($0.000 < \alpha (0,05)$), maka dapat disimpulkan kombinasi variabel bebas yang terdiri dari komisarisis independen (KI) secara bersama-sama mempengaruhi Pengungkapan pengendalian internal (IDC) Hasil ini menunjukkan bahwa model berada dalam kategori baik dan lulus persyaratan uji *goodness of fit* (Ghozali, 2011).

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh komisarisis independen dalam mempengaruhi pengungkapan pengendalian internal (IDC) yang dinyatakan dalam prosentase. Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Model Summary	
Adjusted R Square	
,075	
a. Predictors: (Constant), KI, SMS,SMP, INTERAKSI	
b. Dependent Variable: IDC	

Sumber : data diolah untuk penelitian ini (2019)

Berdasarkan Tabel 7 diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,075. Hal ini menunjukkan bahwasanya variasi pada variabel pengungkapan pengendalian internal (IDC) dapat dijelaskan sebesar 4,1% oleh variabel komisarisis independen (KI) sedangkan sisanya 95,9% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi nilai variabel tetap pengungkapan pengendalian internal (ICD) nilai variabel bebas komisarisis independne (KI). Selain itu, analisis regresi berganda juga digunakan untuk mengetahui nilai t_{hitung} dan signifikansi dari setiap variabel guna dapat melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini terbukti dapat diterima atau ditolak menurut kriteria pengujian yang berlaku.

Hasil analisis model menggunakan regresi berganda yang disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8 Hasil Moderated Regression Analysis (MRA1) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.793	.018		44,473	.000
SQRT KI	-.002	.010	-.112	-212	.829
SQRT M1	-.029	.013	-.421	-2,148	.032
SQRT SMP	-.030	.010	-0,581	-2,963	.003

Sumber : data diolah untuk penelitian ini (2019)

Berdasarkan Tabel 8, persamaan *Moderated Regression Analysis* (MRA1) yang terbentuk sebagai berikut :

$$IDC = 0,748 - 0,023 KI - 0,014 ROA + 0,010 MODERAT - 0,001 Size + 0,2312$$

**Tabel 9 Hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA2)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.793	.018		44,473	.000
SQRT KI	-.006	.009	-.033	-626	.532
SQRT M1	-.019	.004	-.293	-4,846	.000
SQRT SM	-.011	.003	-.215	-3.556	.000

Berdasarkan Tabel 9, persamaan *Moderated Regression Analysis* (MRA2) yang terbentuk sebagai berikut :

$$IDC = 0,786 - 0,006 KI - 0,011 SMS + 0,019 MODERAT - 0,007 Size + 0,2312$$

Persamaan regresi *Moderated Regression Analysis* (MRA1) Tabel 8 dan (MRA2) Tabel 9 dapat ditarik kesimpulan yang antara lain:

1. Konstanta sebesar 0,793 menunjukkan bila tidak ada peningkatan maupun penurunan dari komisaris independen maka nilai pengungkapan pengendalian internal (IDC) adalah sebesar 0,793 persen dengan Struktur Kepemilikan Pemerintah (SMP) sebagai variabel moderasi berada dalam kondisi yang tetap.
2. Koefisien regresi komisaris independen (KI) sebesar -0,002 dengan tingkat signifikansi 0,829 menunjukkan bahwa setiap peningkatan KI sebesar 1 persen maka akan menurunkan pengungkapan sebesar -0,002 persen.
3. Struktur kepemilikan pemerintah (SMP) sebesar -0,030 dan tingkat signifikansi sebesar 0,003 menunjukkan bahwa setiap peningkatan IDC sebesar 1 persen, maka akan menurunkan pengungkapan pengendalian internal (IDC) sebesar -0,030 persen.
4. Koefisien regresi moderasi dari Struktur kepemilikan pemerintah (SMP) terhadap Komisaris independen (KI) sebesar 0,029 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,032 menunjukkan bahwa setiap peningkatan moderasi sebesar 1 persen, maka akan menurunkan pengaruh KI sebesar 0,030 persen dengan asumsi pengungkapan pengendalian internal (IDC) berada dalam kondisi yang tetap.
5. Koefisien *standart error* sebesar 0,2312 dengan toleransi tingkat kesalahan atau alpha 5% (0.05) menunjukkan bahwa tingkat kesalahan dalam penelitian ini sebesar 0,2312 persen.

Persamaan regresi *Moderated Regression Analysis* (MRA2) Tabel 4.17 dapat ditarik kesimpulan yang antara lain:

1. Konstanta sebesar 0,786 menunjukkan bila tidak ada peningkatan maupun penurunan dari komisaris independen maka nilai pengungkapan pengendalian internal (IDC) adalah sebesar 0,786 persen dengan Struktur Kepemilikan Swasta (SMS) sebagai variabel moderasi berada dalam kondisi yang tetap.
2. Koefisien regresi komisaris independen (KI) sebesar -0,006 dengan tingkat signifikansi 0,532 menunjukkan bahwa setiap peningkatan KI sebesar 1 persen maka akan menurunkan pengungkapan sebesar -0,006 persen.
3. Struktur kepemilikan Swasta (SMS) sebesar -0,011 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa setiap peningkatan IDC sebesar 1 persen, maka akan menurunkan pengungkapan pengendalian internal (IDC) sebesar -0,011 persen.
4. Koefisien regresi moderasi dari Struktur kepemilikan swasta (SMS) terhadap Komisaris independen (KI) sebesar 0,019 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa setiap peningkatan moderasi sebesar 1 persen, maka akan menurunkan pengaruh KI sebesar 0,019 persen dengan asumsi pengungkapan pengendalian internal (IDC) berada dalam kondisi yang tetap.
5. Koefisien *standart error* sebesar 0,2312 dengan toleransi tingkat kesalahan atau alpha 5% (0.05) menunjukkan bahwa tingkat kesalahan dalam penelitian ini sebesar 0,2312 persen.

Uji t (*t-test*)

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Hipotesis:

- H_0 = koefisien regresi tidak signifikan.
- H_1 = koefisien regresi signifikan.

Pengambilan keputusan: Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima sedangkan jika probabilitas $< 0,05$, maka H_1 diterima (Ghozali, 2011). Ringkasan hasil dari regresi berganda yang berdasarkan perhitungan adalah sebagai berikut :

Ringkasan hasil dari regresi berganda yang berdasarkan perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel 10 Hasil Uji t

Coefficients ^a				
Independent Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
KI	-1,928	1,9667	,829	Tidak Signifikan
SMP	-2,148	1,9667	,032	Berpengaruh Signifikan
KI*SMP	-2,148	1,9667	,032	Berpengaruh Signifikan

a Dependent Variable: IDC

Sumber : data diolah untuk penelitian ini (2019)

Tabel 11 Hasil Uji t

Coefficients ^a				
Independent Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
KI	-1,928	1,9667	,829	Tidak Signifikan
SMS	-3,556	1,9667	,000	Berpengaruh Signifikan
KI*SMS	-4,846	1,9667	,000	Berpengaruh Signifikan

a Dependent Variable: IDC

Sumber : data diolah untuk penelitian ini (2019)

Berdasarkan Tabel 10 dan Tabel 11 sebagai berikut :

- a. Nilai t_{hitung} untuk variabel Komisaris Independen adalah -1,928 dengan nilai signifikansi sebesar 0,829 lebih besar dari 0,05. Nilai $t_{hitung} -1,928 > 1,9667 t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $0,829 < 0,05$ maka dapat disimpulkan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal sehingga H_1 ditolak.
- b. Nilai t_{hitung} untuk variabel interaksi komisaris independen dengan Struktur Kepemilikan Swasta (SMP) adalah -2,148 dengan signifikansi sebesar 0,032 lebih kecil dari 0,05. Nilai $t_{hitung} -2,148 > 1,9667 t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $0,032 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Struktur Kepemilikan Pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan Pengendalian Internal.
- c. Nilai t_{hitung} untuk variabel interaksi komisaris independen dengan Struktur Kepemilikan Swasa (KixSMP) adalah -2,148 dengan signifikansi sebesar 0,032 lebih kecil dari 0,05. Nilai $t_{hitung} -2,148 > 1,9667 t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $0,032 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa interaksi komisaris independen dengan Struktur Kepemilikan Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal.
- d. Nilai t_{hitung} untuk variabel Size adalah -1,928 dengan signifikansi sebesar 0,055 lebih besar dari 0,05. Nilai $t_{hitung} -1,928 < 1,9667 t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $0,055 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan (Size) berpengaruh negatif terhadap pengungkapan pengendalian internal.
- e. Nilai t_{hitung} untuk variabel interaksi komisaris independen dengan Struktur Kepemilikan Swasta (SMS) adalah -3,556 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai $t_{hitung} -3,556 > 1,9667 t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Struktur Kepemilikan Swasta berpengaruh negatif terhadap pengungkapan Pengendalian Internal.
- f. Nilai t_{hitung} untuk variabel interaksi komisaris independen dengan Struktur Kepemilikan Swasa (KixSMS) adalah -4,846 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai $t_{hitung} -4,846 > 1,9667 t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa interaksi komisaris independen dengan Struktur Kepemilikan Swasta berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Pengendalian internal

Berdasarkan hasil pengujian variabel komisaris independen terhadap pengungkapan pengendalian internal memiliki koefisien regresi -1,928 dengan tingkat signifikan sebesar 0,829 sama dengan $\alpha = 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,928 < 1,9667$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan pengendalian internal atau dengan kata lain hipotesis 1 penelitian ini ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari ratu (2018) serta Ling dan Ding (2011). Penelitian dalam variabel ini tidak berpengaruh, hal ini mengindikasikan bahwa peran pengawasan komisaris independen belum efektif menurut ratu (2018) penambahan jumlah anggota komisaris independen tidak dapat membuktikan mampu meningkatkan pengungkapan informasi tentang pengendalian internal.

Karena kuatnya kendali pemegang saham mayoritas dan pendiri perusahaan menyebabkan berkurangnya independensi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan (Hasil Survei Asian Development Bank, 2004 dalam ratu, 2018). Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen dapat memperbaiki kualitas pengungkapan dan meningkatkan transparansi informasi (Mensah, 2018).

Pengaruh Struktur Kepemilikan Pemerintah terhadap Komisaris Independen dan Pengungkapan Pengendalian internal .

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 10 variabel Struktur Kepemilikan Pemerintah (SMP) sebagai variabel yang memoderasi pengaruh antara Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal diperoleh nilai sebesar -2,148 dengan tingkat signifikan sebesar 0,032 berada lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Struktur Kepemilikan Pemerintah (SMP) memperkuat antara Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal atau dengan kata lain hipotesis 2 (H2) diterima..

Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan pemerintah berperan penting dalam memperkuat hubungan komisaris independen terhadap pengungkapan pengendalian internal. Karena kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah menyebabkan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus selaras dengan kepentingan pemerintah. Pemerintah berhak menunjuk direktur perusahaan sehingga keputusan bisnis yang diambil merupakan kepentingan pemerintah (Lassoued, 2018). Selain itu, imbalan yang diberikan kepada manajer bank sebagian besar tergantung seberapa baik manajer melaksanakan instruksi dari pusat atau pemerintah (Chen *et al.*, 2009). Perusahaan akan mendapatkan sorotan yang lebih besar oleh masyarakat, karena masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap BUMN dari pada perusahaan swasta

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lassoued (2018) dan Chen (2009) yang membuktikan bahwa struktur kepemilikan pemerintah dapat memperkuat hubungan komisaris independen terhadap pengungkapan pengendalian internal dikarenakan suatu perusahaan dapat memberi tekanan kepada manajer perusahaan untuk lebih banyak mengungkapkan informasi, karena pemerintah merupakan badan yang dipercaya oleh rakyat.

Agar pengungkapan Pengendalian Internal dalam laporan tahunan mencukupi kebutuhan informasi *stakeholders* dan sesuai dengan peraturan yang ada, maka diperlukannya *corporate governance*. Linda (2012) menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* diperlukan untuk mengurangi ketidakefisienan yang timbul dari permasalahan keagenan. Keefektifan mekanisme *corporate governance* salah satunya ditentukan oleh komposisi Dewan Komisaris. Peran Dewan Komisaris yang digunakan yaitu Komisaris Independen. Komisaris Independen adalah salah satu mekanisme eksternal yang memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan (Abeysekera, 2008). Proporsi Dewan Komisaris Independen dikatakan sebagai independensi dewan karena kehadiran Komisaris Independen meningkatkan kualitas pengawasan dan bebas dalam pengambilan keputusan (Meyzaroh dan Lucyanda, 2011).

Bagi masyarakat, pengelolaan BUMN yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam berbisnis dan dalam pelaksanaan *corporate governance*. Tekanan atas sorotan masyarakat itulah yang membuat pemerintah lebih transparan lagi dalam pengelolaannya. Teori tersebut didukung oleh penelitian Lassoued et al. (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap risiko.

Pengaruh Kepemilikan Swasta terhadap Komisaris Independen dan Pengungkapan Pengendalian internal.

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 11 variabel Struktur Kepemilikan Swasta (SMS) sebagai variabel yang memoderasi pengaruh antara Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal diperoleh nilai sebesar -4,846 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 berada lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Struktur Kepemilikan Swasta (SMS) memperlemah antara Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal atau dengan kata lain hipotesis 3 (H3) diterima. Pada

umumnya, bank yang dikendalikan oleh pemegang saham swasta lebih termotivasi pada laba perusahaan dibandingkan dengan perusahaan pemerintah. Pemegang saham oleh swasta cenderung untuk memilih manajer senior yang lebih banyak pengetahuannya di perusahaan. Manajer perusahaan swasta lebih memiliki dorongan untuk mengejar tujuan dari pemegang saham, maka pengawasan perusahaan swasta lebih tinggi dan ketat dibanding dengan perusahaan pemerintah (Uddin dan Suzuki, 2011). Para manajer juga mendapat tekanan dari pemegang saham swasta untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, ataupun perusahaan tersebut (Lassoued *et al.*, 2014).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan swasta tidak berperan penting dalam memperkuat hubungan komisaris independen terhadap pengungkapan pengendalian internal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Uddin dan Suzuki (2011) dan Dong, Yizhe *et al.* (2014) yang membuktikan bahwa struktur kepemilikan swasta dapat memperlemah hubungan komisaris independen terhadap pengungkapan pengendalian internal dikarenakan Dari adanya tekanan dari pemegang saham untuk mencapai tujuannya yaitu mencapai laba maka para manajer hanya fokus pada pemegang saham terbesar pada perusahaan tersebut dan kurang memberikan pengungkapan atau informasi yang sebenarnya kepada *stakeholders* minoritas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan pengendalian internal, maka dapat disimpulkan hipotesis 1 dalam penelitian ini ditolak.
2. Struktur kepemilikan sebagai variabel moderasi, dapat diketahui bahwa variabel struktur kepemilikan pemerintah merupakan variabel yang memperkuat hubungan antara komisaris independen terhadap pengungkapan pengendalian internal atau dengan kata lain hipotesis 2 dalam penelitian ini di terima.
3. Struktur kepemilikan sebagai variabel moderasi, dapat diketahui bahwa variabel struktur kepemilikan swasta merupakan variabel yang memperlemah hubungan antara komisaris independen terhadap pengungkapan pengendalian internal atau dengan kata lain hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan juga keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran untuk perbaikan penelitian ini di masa yang akan datang yaitu:

1. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya selama tiga tahun yaitu tahun 2013-2018. Penelitian serupa di masa yang akan datang diharapkan dapat memperluas periode pengamatan. Ini diperlukan agar hasil penelitian dapat diuji konsistensi dan generalisasinya.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan wajib seperti Komite Audit, Dewan Direksi, Hak pemegang saham dan variabel lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan pengendalian internal.

DAFTAR PUSTAKA

- A Che-Ahmad, S Abidin, 2013. Audit delay of listed companies: A case of Malaysia bidin Internasional business research 1 (4), 32.
- Agyei-Mensah, B. K. in press, 2016. *Divisional Performance Measurement in the Retail Financial Service Sector: An Empirical Study. International Journal of Productivity and Performance Management (SCOPUS)*.
- Ajina, Aymen, Bouchareb, Mariem, Souid, Slim. 2013. Corporate Governance Mechanisms And Earning Management After And Before The Adoption Of IFRS. *The Business & Management Review*, Volume 3 Number 4.
- Akira Yonekura, Sonja Gallhofer, Jim Haslam. *Accounting disclosure, corporate Governance and the battle for markets: The case of trade negotiations between Japan and the U.S. Critical Perspectives on Accounting 23 (2012)*.
- Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini, 2004. *Komisaris Independen: Penggerak Praktek GCG di Perusahaan*, PT. Indeks kelompok gramedia, Jakarta.
- Amin Widjaja Tunggal, AK, CPA, MBA. 2013. *Dasar-dasar pengendalian internal dan corporate governance*. 41-42.
- Amran, Azlan, 2009. "Risk Reporting : An Exploratory Study On Risk Management Disclosure In Malaysia Annual Reports". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24, No. 1.
- Andi Kartika, 2009 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta)*.
- Andre Novado, 2014. *Kinerja Perbankan Pada Kepemilikan: Domestik, Asing, Pemerintah, Dan Swasta*.
- Anup Kumar Saha 2011 *Management Disclosures on Internal Control in Annual Reports- A Study on Banking Sector: Bangladesh Perspective International Journal of Economics and Finance. Vol. 3, No. 5; October 2011*.
- Ashbaugh-Skaife, H.,D. Collins, dan W. Kinney. 2007. "The discovery and Consequences of Internal Control Deficiencies Prior to SOX-Mandated Audits". *Journal of Accounting and Economics 44 (2007) 166–192,16 September 2012,10:28*.
- Ayoib Che Ahmad. 2013. *Corporate governance and earnings management: A study on the Malaysian family and non-family owned PLCs*.
- Bhasin, M.L. (2010) *Corporate Governance Disclosure Practices: The Portrait of a Developing Country. International Journal of Business and Management*, 5, 150-167.
- Brown, R. E and Mazur, M.J. 2003. *IRS'S Comprehensive Approach to Compliance Measurement. National Tax Journal*, Vol. 56, No. 3 September 2003, pp 689-700.
- Djoko Suhardjanto Aryane Dewi dan Erna Rahmawati Firazonia M. (2012). *Peran Corporate Governance Dalam Praktik Risk Disclosure Pada Perbankan Indonesia*.
- Dong Yizhe, Chao Meng, Michael Firth, Wenxuan Hou, 2014. *Ownership structure and internal control: Comparative evidence from private and state-controlled banks in China*.
- Drs. Amin Widjaja Tunggal , Ak, CPA, MBA. 2013. *Buku Dasar-Dasar Pengendalian Internal Dan Corporate Governance*.
- El-chaanari 2014. "The Impact of Corporate Governance on the Performance of Lebanese Banks" *The International Journal of Business and Finance Research*, vol. 8 (5) p. 35-46, 2014.
- Faqiatul Mariya Waharini, 2012. *Kualitas Komite Audit, Independensi Auditor, Dan Kelemahan Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada Perusahaan Indonesia yang Listing di New York Stock Exchange)*.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2010)*

- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20 (edisi kelima) Semarang Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar, 2003, *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- Guojin Gong, Bin Ke, Yong Yu, 2013. *Home Country Investor Protection, Ownership Structure and Cross-Listed Firms' Compliance with SOX-Mandated Internal Control Deficiency Disclosures*.
- Hani El-Chaarani, 2014. *The Impact Of Corporate Governance On The Performance Of Lebanese Banks*.
- Hiroshi uemura, 2014. *Effects of corporate governance reform on the quality of internal controls: Evidence from Japan*. Kochi University of Technology
- Huafang, Xiao dan Yuang Jianguo, " Struktur Kepemilikan, Komposisi Dewan dan Perusahaan Sukarela Pengungkapan : Bukti dari Perusahaan yang Terdaftar di Cina", *Manajerial Auditing Journal* Vol. 22 Iss: 6 pp 604-619, 2007.
- I Made Sudana 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Erlangga, Jakarta.
- [Indra Abeysekera](#), (2008) "Intellectual capital disclosure trends: Singapore and Sri Lanka", *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 9 Issue: 4.
- Intan Alvionita, Salma Taqwa, 2018. Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure.
- Jensen, Michael C., Meckling, William H.1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, Vol 3, No 4.
- Jianfei Leng, Yiran Ding. 2011. *Internal Control Disclosure and Corporate Governance: Empirical Research from Chinese Listed Companies Technology and Investment, scientific research 2011*.
- Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006.
- Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP Tahun 2003.
- Limantauw Shirly. 2012 Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Sebagai Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi-Vol,1 No.1*, Januari 2012.
- Marcia Millon Cornett, Jamie John McNutt, Hassan Tehranian 2009. *Corporate governance and earnings management at large U.S. bank holding companies*. *Journal of Corporate Finance 15 (2009) 412–430*.
- Mehdi Nekhili, Sabri Boubaker, Faten Lakhali. 2012. *Ownership Structure*,
- Meizaroh, dan J. Lucyanda. 2011. "Pengaruh Corporate Governance dan Konsentrasi Kepemilikan pada Pengungkapan Enterprise Risk Management". *Jurnal SNA*. Vol. 14.
- Nuswandari, 2009. Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta. Vol 16, No 2, 2009.
- Pengendalian internal menurut laporan COSO (The Committee Of Sponsoring Organizations Of Treadway Commission).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/2012 Tentang Transparansi Dan Publikasi.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/ 22 /DPNP/ 2003. Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006. Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum.
- Raja Adzrin Raja Ahmada, Norhidayah Abdullaha, Nur Erma Suryani Mohd Jamel and Normah Omar. *Board Characteristics and Risk Management and Internal Control Disclosure Level: Evidence from Malaysia*. *International Accounting And Business Conference 2018*, Iabc 2018.

- Ramdhani, Dadan dan Firdaus Frekuensi Sukmana. 2018. *Operational Strategy Analysis Using Lean Six Sigma At PT.Four Jaffee Indonesia*. Indonesia: RJOAS Vol.9 No.81
- Ramdhani, Dadan dan Yusuf, Muhammad. 2018. *Financial Strategy Analysis PT.Four Jaffee Indonesia*. Indonesia: *International Journal of Economics, Commerce and Management*. Vol. VI, Issue 9
- Ramdhani, Dadan. 2018. Kontribusi Strategi Bisnis Dan Lingkungan Eksternal Dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Manajemen: Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Perhotelan Di Provinsi Banten. Banten: Tirtayasa Ekonomika. Vol.13 No.2 Oktober 2018
- Ramdhani, Dadan. 2018. Peran Keutamaan Organisasi Dan Akuntabilitas Publik Dalam Memengaruhi Kinerja Sektor Publik Di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Banten: *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. Vol.11 No.2 September 2018 Hal. 208-228
- Rani Femiarti, Totok Dewayanto, 2012. Audit Committee Financial Experts, Internal Audit, Dan Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Ratu Ayu Fanisa Nariah. 2018. Corporate Governance Dan Pengungkapan Pengendalian Intern. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi*.
- S. M. Sohrab Uddin, 2011. *Financial Reform, Ownership and Performance in Banking Industry: The Case of Bangladesh*.
- Shleifer, Andrei dan Robert W. Vishny, "A Survey of Corporate Governance", *Journal of Finance* Vol. LII No 2 June 1997
- Sun, Ye, Yang Yi dan Bin Li , "Board Independence, International Information Environment and Voluntary Disclosure of Auditors' Report of Internal Controls", *China Journal of Accounting Research* Vol. 5, No.1, pp. 145-161, 2012.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/35/DPNP Tahun 2012 Tentang Laporan Tahunan Bank Umum Dan Laporan Tahunan.
- The Committee Of Sponsoring Organizations Of Treadway Commission, 1992. Voluntary R&D Disclosure and Market Value of Firms: The French Case International Journal Of Business, 17(2), 2012.*
- Wiranata dan Nugrahanti, 2013. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 15 No. 1, hal 15-46.
- Xu-dong Ji, Wei Lu, Wen Qu, 2018. *Determinants and economic consequences of voluntary disclosure of internal control weaknesses in China*. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*.
- Yan Zhang, Jian Zhou, Nan Zhou Audit. 2007 *committee quality, auditor independence, and internal control weaknesses*.
- Yao Huaying, 2011. *Empirical Analysis of Internal Control Disclosure in China: based on independent directors' standpoint 2011 International Conference on Uncertainty Reasoning and Knowledge Engineering*.

